

MANAJEMEN STASIUN RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO DALAM MENJALANKAN PRINSIP PENYIARAN PUBLIK

Dita Frety Raka Putri

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
ditaputri2@mhs.unesa.ac.id

Vinda Maya Setianingrum, S.Sos., M.A.

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
vindasetianingrum@unesa.ac.id

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, merupakan awal dari demokratisasi penyiaran di Indonesia, dengan dihapuskannya media penyiaran Pemerintah menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Transformasi ini membawa perubahan di bidang media, terutama pada fungsi yang dimilikinya. Penyiaran Pemerintah memiliki fungsi sebagai corong dari Pemerintah, sementara Lembaga Penyiaran Publik berfungsi sebagai media yang menyediakan ruang publik bagi warganya. Radio Suara Kota Probolinggo yang terletak di Kota Probolinggo awalnya merupakan RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) namun telah bertransformasi menjadi LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mengetahui Manajemen dari Radio Suara Kota Probolinggo dalam menjalankan prinsip penyiaran publik, dengan menggunakan teori manajemen dari George R Terry, maka peneliti memperoleh informasi mengenai kelembagaan, kumpulan program dan pendanaan yang dimiliki oleh Radio Suara Kota Probolinggo. Sehingga dapat diketahui apakah radio telah memenuhi kriteria sebagai lembaga penyiaran publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Radio Suara Kota Probolinggo telah memiliki varietas program dengan berfokus pada identitas dan kultur nasional. Namun, masih belum melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik karena adanya beberapa faktor seperti, lemahnya independensi, dan pendanaan yang masih membebani APBD, mengingat radio masih dalam naungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Kata kunci : Manajemen, LPPL, Demokrasi, Suara Kota Probolinggo

Abstract

The enactment of Law No. 32 of 2002 concerning broadcasting, is the beginning of the democratization of broadcasting in Indonesia, with the abolition of the Government's broadcasting media into a Public Broadcasting Institution. This transformation brings changes in the media field, especially in the function it has. Government Broadcasting has the function as a mouthpiece of the Government, while the Public Broadcasting Institution functions as a medium that provides public space for its citizens. Radio Suara Kota Probolinggo which is located in Probolinggo City was originally a RKPD (Special Regional Government Radio) but has been transformed into LPPL (Local Public Broadcasting Institution). This study uses a case study method to find out the Management of Probolinggo City Voice Radio in carrying out the principle of public broadcasting, using management theory from George R Terry, the researcher obtained information about the institutions, collection of programs and funding owned by Radio Suara Probolinggo City. The results of this study indicate that Radio Suara Kota Probolinggo already has a variety of programs with a focus on national identity and culture. However, it still has not carried out its function as a Public Broadcasting Institution due to several factors such as weak independence and funding that still burden the regional budget, considering that radio is still under the auspices of the City Government of Probolinggo.

Keyword : Management, Local Public Broadcasting Institution, Democracy, Radio Suara Kota Probolinggo

PENDAHULUAN

Keberadaan penyiaran publik dipahami oleh sebuah filosofi yang menganggap khalayak sebagai active citizen, yang artinya bahwa penyiaran publik dapat memberikan ruang publik untuk warganya agar bisa berdiskusi bersama secara rasional tanpa intervensi dari negara dan pasar dengan tujuan membangun konsensus bersama. Disinilah adanya keterpercayaan untuk saling membangun solidaritas dalam menjalankan kehidupan publik. (Rochmad Effendy, 2014).

Di Indonesia telah melakukan perubahan penting dalam bidang penyiaran dengan dihapuskannya media penyiaran pemerintah diganti dengan media penyiaran publik melalui pengesahan UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Melalui UU No 32/2002 menjelaskan tentang pengenalan penyiaran publik dalam reformasi media di Indonesia, yaitu dengan mengubah status RRI dan TVRI dari lembaga penyiaran pemerintah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (selanjutnya ditulis LPP). Kedua media ini sejak keberadaannya sudah melakukan siaran secara nasional. Dengan mengacu pada regulasi penyiaran,

maka di Indonesia terdapat dua jenis LPP. Pertama, LPP yang bersiaran secara nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu RRI dan TVRI. Kedua, LPP yang bersiaran secara lokal baik yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten atau Kota. Pada dasarnya LPP Lokal umumnya adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) (Putra, 2014).

Dalam proses transisi kelembagaan, Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) dengan melalui persetujuan DPRD dapat menjadi badan publik, namun pada praktiknya membutuhkan waktu yang cukup lama serta berbelit, terlebih apabila perda tersebut tidak ada keterlibatan ekonomis bagi daerahnya (Salman, 2011).

Sebelum memiliki nama Suara Kota Probolinggo, radio ini awalnya merupakan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) yang dikelola oleh bagian Humas Pemerintah Kota Probolinggo. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah, Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD), berganti nama menjadi Radio Suara Kota Probolinggo, yang terhitung mulai 1 Juni 2002.

Radio Suara Kota Probolinggo merupakan radio penyiaran publik lokal yang memiliki kewenangan dari Pemerintah, dalam hal memberikan informasi dan mempublikasikan mengenai program dan kebijakan pemerintah Kota Probolinggo. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai program yang sedang maupun yang hendak dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait manajemen stasiun Radio Suara Kota Probolinggo dengan menggunakan teori manajemen *George R. Terry*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Menurut Yin (2005) pokok pertanyaan yang akan diajukan oleh penulis jika memakai metode studi kasus ialah tentang “mengapa dan bagaimana” yang akan mengarah kepada penggunaan strategi studi kasus. Dalam menganalisis objek penelitian ini menggunakan model analisis *Miles* dan *Huberman Punch* diantaranya reduksi data, model data, kesimpulan (Pawito, 2008).

Data yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Kepala Radio Suara Kota Probolinggo, Penanggung jawab Program, Penanggung jawab Manajemen Keuangan, dan Penyiar Radio Suara Kota Probolinggo. Observasi dilakukan dengan mengamati tugas dan kegiatan dari masing-masing pembagian kerja di Radio Suara Kota Probolinggo. Dokumentasi dengan mengumpulkan foto-foto dan dokumen terkait Radio Suara Kota Probolinggo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mendeskripsikan manajemen stasiun Radio Suara Kota Probolinggo, peneliti mengaitkan dengan teori manajemen menurut *George R. Terry*. Peneliti melakukan penelitian dengan meneliti kumpulan program yang dimiliki oleh Radio Suara Kota Probolinggo untuk mengetahui apakah telah memenuhi prinsip dari penyiaran publik seperti memiliki varietas program dengan berfokus pada identitas, kultur nasional dan tersedia secara general-geographis. Kelembagaan, digunakan untuk melihat posisi dari Radio Suara Kota Probolinggo terhadap Pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir, pendanaan digunakan peneliti untuk mengetahui sumber biaya atau anggaran yang diperoleh radio setiap tahunnya. Dari ketiga elemen tadi, maka akan ditemukan data dan informasi mengenai Manajemen Stasiun Radio Suara Kota Probolinggo dalam Menjalankan Prinsip Penyiaran Publik.

Kelembagaan LLPL Radio Suara Kota Probolinggo

Radio Suara Kota Probolinggo, merupakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang masih berada dibawah naungan Pemerintah, yaitu dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Struktur organisasi yang dimiliki oleh radio, adalah struktur organisasi yang bergabung didalam struktur organisasi Diskominfo kota Probolinggo, dan masuk dalam Bidang Pengelolaan Informasi Publik (Bidang PIP). Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sendiri, memiliki empat bidang didalamnya yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Probolinggo. Empat bidang diantaranya, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan terakhir Bidang Layanan E-Government.

Radio Suara Kota Probolinggo tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis, namun pembagian kerja pada setiap anggota tetap ada dan berjalan. Tumpang tindih pembagian kerja atau *double job desk* nampak didalam kepengurusan manajemen radio Suara Kota Probolinggo, seperti penyiar harus bisa mengelola marketing terkait pengurusan iklan, dan menulis berita yang dimuat di web Pemerintah Kota.

a. Tidak Berjalannya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Pada tahap pengawasan ini, fungsi dari pengawasan tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang tertulis. Dewan Pengawas tidak bisa diterapkan, karena posisi radio yang masih bertumpu pada Pemerintah Kota dan berada dalam naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, sehingga nama yang tercantum pada Dewan Pengawas hanyalah sebuah formalitas belaka

yang dibuat untuk memenuhi syarat menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) pada saat itu dan hingga saat ini, nama Dewan Pengawas yang tercantum belum juga berubah.

Masih berada dalam naungan Pemerintah Kota Probolinggo, membuat radio ini memiliki pengawasan dari kalangan orang-orang Pemerintahan. Kritik dari orang Pemerintahan, juga sering disampaikan kepada Kepala Radio Suara Kota Probolinggo, Evi Hidayati seperti kritikan program yang kurang atau tidak sesuai.

b. Radio dan Digitalisasi

Di era digitalisasi seperti saat ini, semakin menguasai kehidupan masyarakat terutama dalam hal berkomunikasi dan memperoleh informasi. Digitalisasi yang memaksa perubahan dari sistem analog menjadi digital, juga mempengaruhi radio yang berada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Radio Suara Kota Probolinggo.

Inovasi terbaru salah satunya mengenai penyampaian informasi publik kepada masyarakat Kota Probolinggo, dengan menghadirkan sebuah aplikasi bernama View Probolinggo. Aplikasi View Probolinggo adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo di tahun 2019, dengan tujuan untuk bisa lebih dekat dengan rakyat, membantu memberikan informasi publik, dan pelayanan publik yang menjawab semua pertanyaan maupun pengaduan dari masyarakat.

Format Program Siar

Sesuai dengan visi dan misi radio Suara Kota Probolinggo yaitu menyajikan program siaran berbentuk informasi yang mendidik, serta hiburan yang sehat sebagai media penyiaran publik (Public Service Broadcasting). Tahun 2019 Radio Suara Kota Probolinggo memiliki program informasi dengan persentase 62% lebih tinggi dibanding dengan program hiburan yang mencapai 38%. Adapun program informasi yang dimiliki oleh Radio Suara Kota Probolinggo meliputi, Ekspresi Pagi, Laporo Rek 1, Laporo Rek 2, Laporo Rek Bolinggoan, Kurcaci, Bubur Sagu, Sahabat Anak, Ilfil, Otto Sport. Dan untuk program hiburan yaitu program yang menyajikan lagu-lagu seperti Jamming Lagu, Gandulan, Campursari, Macindo, Tembang Kenangan, dan Jagusi.

a. Memiliki Varietas Program

Dalam menjalankan tugasnya sebagai radio publik, membuat Radio Suara Kota Probolinggo harus bisa memberikan program untuk pendengarnya, sebagai media informasi, hiburan yang sehat dan sebagai kontrol sosial untuk

masyarakat Kota Probolinggo. Sehingga penentuan *positioning* adalah penetapan pertama yang harus dilakukan. Yang dimaksud *positioning* disini yaitu pendengar seperti apa yang akan menjadi target program yang akan dibuat.

Sebagai media daerah, radio publik lokal memberikan *content* yang penyajiannya dikemas dengan mengutamakan kearifan local. Program siaran yang ada di Radio Suara Kota Probolinggo terbagi menjadi dua katagori. Pertama program informasi, yang mana program ini menyajikan beragam informasi lokal yang meliputi informasi sekitar Kota Probolinggo, berita nasional dan berita Internasional. Kedua, program hiburan yang berisi lagu-lagu dari berbagai *genre* music, mulai dari *genre* anak-anak, pop Indonesia baru, pop Indonesia era 90 an, keroncong, dangdut hingga tembang kenangan yang dikemas dengan porsi yang seimbang.

1) Mendukung Kota Probolinggo Sebagai KLA Melalui Program Anak

Disamping sebagai media penyalur aspirasi masyarakat melalui programnya Laporo Rek, Radio Suara Kota Probolinggo juga memiliki program siaran untuk anak-anak. Dilansir dari wartabromo.com, Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak (KLA) ini mendapatkan penghargaan naik kelas Madya, dari yang awalnya Pratama. Untuk mensukseskan dan mendukung Kota Layak Anak, Radio Suara Kota Probolinggo juga memberikan program khusus untuk anak-anak seperti mendongeng, bernyanyi, parenting dan informasi seputar dunia anak. Kegiatan mendongeng, penyiar biasanya melakukan rekaman suara terlebih dahulu sebelum akhirnya diputar di radio. Selain itu, kegiatan mendatangkan anak-anak TK juga pernah dilakukan, namun kegiatan ini sesuai kebijakan dari IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak).

2) Dialog Interaktif sebagai Ruang Publik Warga

Dialog interaktif merupakan salah satu media ruang publik yang disediakan oleh Radio Suara Kota Probolinggo untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi di wilayah Kota Probolinggo, seperti informasi pelayanan publik, informasi mengenai kesehatan dan sebagainya yang berdiskusi bersama OPD atau instansi yang terkait. Selain itu, dialog interaktif ini juga melibatkan publik didalamnya yang dapat berkomunikasi secara langsung atau tanya jawab dengan narasumber.

Langkah awal dalam melakukan siaran dialog interaktif ini, tim produksi dari radio Suara Kota Probolinggo terlebih dahulu melihat

permohonan-permohonan yang masuk, biasanya permohonan ini berasal dari OPD atau instansi yang ingin melakukan dialog interaktif di Radio Suara Kota Probolinggo.

3) Memperkuat Jaringan Penyiaran LPPL Melalui Program Buletin Jawa Timur

Demi memberikan sarana informasi dan menangkal hoaks, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Jawa Timur membentuk Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berkomitmen hadir sebagai media yang memberikan informasi mengenai kebijakan Pemerintah di masing-masing daerah.

Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, membentuk program bernama "Buletin Jawa Timur". Buletin Jawa Timur merupakan program yang menyajikan informasi terkait pembangunan seperti informasi ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan di masing-masing 15 Kota dan Kabupaten yang tergabung dalam Asosiasi.

Selain sebagai media pemberi informasi seputar Jawa Timur, Program Buletin Jawa timur berusaha untuk dikemas secara menarik demi menjawab informasi yang dibutuhkan masyarakat akan pembangunan daerahnya. Selain itu, terbentuknya Asosiasi LPPL Jawa Timur digunakan sebagai jembatan dalam mempermudah kepengurusan izin. Karena saat ini dari 38 se Kota dan Kabupaten di Jawa Timur yang sudah memiliki izin terbatas.

b. Berfokus pada Identitas dan Kultur Nasional

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang memiliki tugas melayani dan memberikan informasi publik kepada masyarakat, memberikan hiburan sehat dan mendidik serta sebagai perekat sosial dan mempersatu bangsa dalam program siarnya, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pada pasal 36 dijelaskan bahwa isi siaran, wajib memuat minimal 60% program siar yang berasal dari dalam negeri.

Program lokal yang dimiliki oleh Radio Suara Kota Probolinggo sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal, juga sangat beragam. Melihat bahwa di Kota Probolinggo memiliki penduduk mayoritas suku Madura, membuat Radio Suara Kota Probolinggo menghadirkan program yang identic dengan penggunaan Bahasa Madura. Contoh program seperti Laporo Rek yang saat ini telah memiliki jam siar semakin lama yaitu dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang, yang menyajikan segala informasi mengenai Kota Probolinggo dan sekaligus sebagai tempat bagi masyarakat untuk

menyampaikan aspirasinya, kritik saran dan pertanyaan kepada Pemerintah maupun instansi yang terkait.

Dalam program Laporo Rek Bolinggoan ini, menggunakan bahasa kedaerahan seperti bahasa Jawa Ngoko dan Madura untuk memperkuat identitas dari Kota Probolinggo. Menentukan penyiar saat membawakan program Laporo Rek Bolinggoan ini tidaklah sembarangan. Penanggung jawab program harus mendapatkan *chemistry* antar dua penyiar dan juga penyiar dituntut untuk pandai dalam berkomunikasi berbahasa Madura. Tak jarang, masyarakat yang bergabung melalui via telephone, juga berbicara menggunakan bahasa Madura. Sehingga program akan menarik jika antara penyiar dengan pendengar sama-sama fasih dalam penggunaan bahasa Madura.

Saat ini pendengar radio berada pada ring usia 30 tahun. Untuk itu, demi mempertahankan keberadaan dari radio, maka penggemar lagu-lagu dangdut, Madura dan Banyuwangi tetap diberi porsi untuk pendengar melalui program Gandulan (Goyang Dangdut Gendang Kempulan). Sementara porsi untuk penggemar lagu bergenre tembang Jawa, Keroncong juga diberikan melalui program Campur Sari. Program Campur Sari juga merupakan salah satu program yang dapat melestarikan budaya lokal. Di Kota Probolinggo sendiri, pendengar aktif yang sering melakukan interaksi melalui via telephone adalah orang-orang Kecamatan atau orang Desa yang memiliki sebuah komunitas bernama KPK (Kelompok Pendengar Kadaluarsa), yang aktif hampir setiap hari melakukan interaksi dengan penyiar, tak heran apabila penyiar hafal dengan nama mereka walaupun hanya melalui via suara.

Sumber Biaya Pengelolaan Radio Suara Kota Probolinggo

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pasal 15, dijelaskan untuk sumber pembiayaan pada Lembaga Penyiaran Publik berasal dari siaran iklan, APBN atau APBD, iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, atau iuran lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Dalam praktiknya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Probolinggo hingga saat ini menggunakan dana APBD sebesar 220-250 juta setiap tahunnya yang diterima karena posisi radio masih bertumpu pada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan, dan iklan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk disetorkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun sebesar 115-195 juta. PAD selalu mengalami peningkatan apabila telah terpenuhi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

diterima Radio Suara Kota Probolinggo setiap tahunnya sekitar 200 juta rupiah. Namun nominal tersebut berubah setiap tahun, tergantung tersedianya anggaran di Pemerintah.

APBD yang diterima oleh radio Suara Kota Probolinggo sebesar 200 juta ini, digunakan untuk pengelolaan manajemen dengan berbagai macam kebutuhan, seperti Membayar Tenaga Harian Lepas (THL), pemeliharaan gedung, perawatan alat-alat dan sebagainya. Namun, dengan dana sebesar itu, masih dirasa kurang untuk keperluan di radio.

Berbeda dengan LPPL Radio Suara Sidoarjo dan Mahardika Fm Blitar, yang telah menjadi LPPL independen, tidak terikat oleh Pemerintah. Dalam pendanaan, dua radio tersebut telah mampu menghasilkan dana sendiri, tanpa membebani APBD. *Support* dari pihak swasta lah yang membuat radio tersebut menjadi besar dengan biaya iklan yang lebih tinggi dibanding dengan radio Suara Kota Probolinggo.

PENUTUP

Simpulan

Dari analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Manajemen Radio Suara Kota Probolinggo dalam Menjalankan Prinsip Penyiaran Publik sebagai berikut, Radio Suara Kota Probolinggo telah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pendirian. Saat ini, radio pemerintah tidak bisa dikatakan sebagai RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) karena arah radio menuju pada melayani masyarakat dan tugasnya untuk menjembatani masyarakat kepada Pemerintah.

Masuk dalam Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo, membuat radio ini tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis, hanya pembagian kerja saja yang diterapkan dalam tim. Susunan kepengurusan sering berganti karena adanya rolling staff, mutasi dari Pemerintah, dan Kasie radio juga lebih sering dirubah, dibandingkan dengan penyiar.

Memiliki program bernama Laporo Rek yang saat ini telah memiliki jam siar semakin lama yaitu dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang, menyajikan segala informasi mengenai Kota Probolinggo dan sekaligus sebagai tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, kritik saran dan pertanyaan kepada Pemerintah maupun instansi yang terkait.

Dengan anggaran yang masih bersumber dari APBD membuat Radio Suara Kota Probolinggo belum dapat dikatakan independen dari Pemerintah secara finansial. Radio harus selalu mengikuti alur program-program yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai bahan pemberitaan.

Saran

Melemahnya regulasi yang digunakan sebagai fondasi dari Lembaga Penyiaran Publik sendiri yaitu tidak adanya Dewan Pengawas. Nama Dewan Pengawas saat itu hanya dijadikan sebagai formalitas dalam proses perizinan menjadi LPPL, dan hingga saat ini belum adanya pergantian dari nama Dewan Pengawas.

Masih berada dalam naungan Pemerintah, namun struktur organisasi internal, haruslah ada karena dengan adanya struktur organisasi dapat mengetahui alur dari sebuah proses penyiaran sehingga dapat terlihat jelas tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota. Selain itu, harus menegakkan dasar hukum atas keberadaan LPPL yang menyangkut perundangan seperti adanya Dewan Pengawas dan Direksi dalam sebuah LPPL.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Rochmad. 2014. *Memperluas Partisipasi Demokratis Masyarakat Dalam Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI)*. Malang: Universitas Merdeka Malang.
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS.
- Putra, I Gusti Ngurah. 2014. *Penyiaran Publik Lokal sebagai Ruang Publik: Studi Kasus pada Ratih TV Kebumen*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Salman, R. 2011. *Kajian Yuridis: Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai Badan Hukum Penyelenggaraan Penyiaran*. Surabaya: Acara Seminar 23 Februari 2011.
- Surokim dan Tatag Handaka. 2014. *Transisi Kelembagaan dan Isi Siaran Radio Pemda Menjadi Radio Publik Lokal di Jawa Timur*. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 27, No. 3
- Terry, George R. 2016. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yin, R.K. 2005. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

